KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kontroversi Jabatan Ahok: Hak Angket Segera Dibawa ke Paripurna
Tanggal : Selasa, 21 Februari 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

::KONTROVERSI JABATAN AHOK

Hak Angket Segera Dibawa ke Paripurna

PIMPINAN DPR memastikan wacana hak angket menyikapi status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap bergulir dan segera dibacakan di rapat paripurna DPR. Sedikitnya 93 orang yang mendukung pembentukan panitia khusus hak angket ini.

Hak angket ini digulirkan guna menyelidiki kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak memberhentikan sementara Ahok dari jabatan gubernur meski berstatus terdakwa dalam kasus penodaan agama. Sejauh ini perjalanan hak angket sudah di Badan Musyawarah (Bamus). Nanti Bamus akan rapat dan memutuskan penjadwalannya untuk dibacakan di paripurna.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, penggalangan hak angket telah memenuhi persyaratan, yakni ditandatangani lebih dari 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

"Yang ajukan itu sudah 90 anggota Dewan melibatkan empat fraksi. Ini sudah memenuhi kuorum," ucap Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

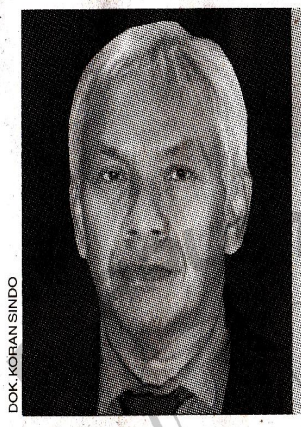

DOK. KORAN SINDO

"Nanti paripurna berikutnya kita mengambil keputusan."

AGUS HERMANTO
Wakil Ketua DPR

Karena itu, lanjut Agus, pimpinan DPR segera memproses pengajuan hak angket tersebut sesuai undang-undang yang berlaku dengan membacakannya dalam rapat paripurna terdekat. "Mudah-mudahan itu 23 (Februari 2017) besok atau paling tidak tanggal 24," ujarnya.

Pada rapat paripurna nanti, kata dia, DPR akan mengambil keputusan mengenai usulan tersebut. "Kemudian nanti paripurna berikutnya kita mengambil keputusan di mana di situ ada pendapat-pendapat fraksi dan pendapat anggota Dewan," imbuh Agus.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga memastikan hak angket Ahok terus bergulir dan segera dibawa ke rapat paripurna. Namun, politikus PKS ini memperkirakan pengambilan keputusan hak angket ini kemungkinan akan memakan waktu lama karena terpotong masa reses DPR yang akan dimulai pada 24 Februari. "Kalau di paripurna nanti baru pembacaan, lalu ada jeda untuk persetujuan hingga lobi soal siapa yang setuju dan enggak setuju. Jadi cukup panjang," ujarnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra Raden Muhammad Syafii meminta dukungan para ulama memengaruhi fraksi lain di DPR untuk mendukung realisasi penggunaan hak angket untuk Ahok. Ada enam fraksi di DPR yang menyatakan tidak mendukung hak angket ini yakni PDIP, Golkar, Hanura, NasDem, PKB, dan PPP. Semuanya merupakan pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Sedangkan yang mendukung yakni Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN.

"Saya bersyukur karena masih ada ulama yang mengawal ini," ujarnya saat menerima audiensi ulama se-DKI Jakarta di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

kiswondari/okezone